



RENJA

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2026

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 39 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan daerah yang terarah, profesional, dan berkesinambungan, perlu didukung dengan rencana kerja perangkat daerah yang selaras dengan tujuan, sasaran, dan prioritas pembangunan daerah;
- b. bahwa rencana kerja perangkat daerah memuat arah kebijakan perangkat daerah yang berpedoman pada rencana kerja pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Bupati adalah Bupati Bantul.
5. Daerah adalah Kabupaten Bantul.

Pasal 2

- (1) Renja PD disusun berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah Tahun 2026.

Pasal 3

- (1) Renja PD sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika:
BAB I : PENDAHULUAN
BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BAB V : PENUTUP
- (2) Renja PD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 30 Juli 2025
BUPATI BANTUL,

ABDUL HALIM MUSLIH



Diundangkan di Bantul
pada tanggal 30 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,


AGUS BUDIRAHARJA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2025 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 39 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2026
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA MANUSIA**
KABUPATEN BANTUL

BAB I.

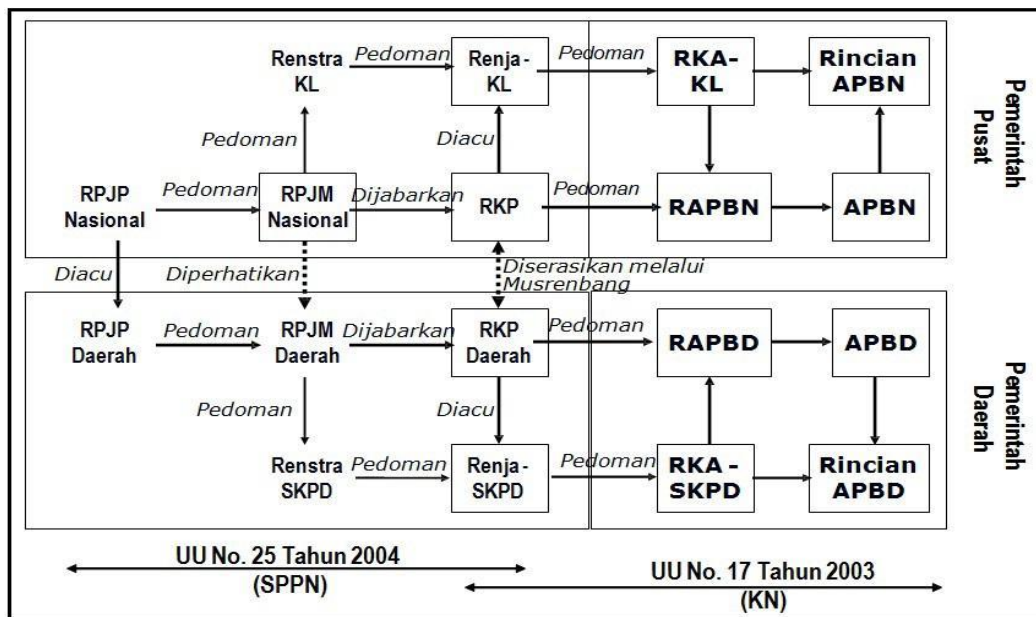
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun. Penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan amanat Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renja Perangkat Daerah disusun oleh setiap Perangkat Daerah termasuk oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM). Renja BKPSDM Tahun 2026 memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Renja BKPSDM Tahun 2026 akan menjadi pedoman dalam menyusun RKA Tahun 2026 dan digunakan sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Tahun 2026.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1. Gambar tersebut menjelaskan bahwa Renja Perangkat Daerah disusun dengan mengacu pada RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah serta menjadi pedoman dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah.



Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Renja BKPSDM Tahun 2026 disusun dengan tahapan sebagai berikut:

- a. Persiapan penyusunan,
- b. Penyusunan rancangan awal,
- c. Penyusunan rancangan,
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,
- e. Perumusan rancangan akhir, dan
- f. Penetapan.

Rancangan Renja BKPSDM Tahun 2026 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026, hasil evaluasi

Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Rancangan Awal RKPD Tahun 2026.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rancangan Renja BKPSDM Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Dana Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019 Nomor 85);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 24 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 2);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembanguna Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun

2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 173);

- l. Peraturan Bupati Bantul Nomor 56 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 56);
- m. Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah dan Badan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 49);
- n. Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 32).

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 disusun untuk menyesuaikan gambaran kondisi umum dan permasalahan perangkat daerah dengan kondisi dan permasalahan terkini serta menyesuaikan rencana kerangka pendanaan perangkat daerah terhadap kemampuan keuangan daerah sehingga diperoleh dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan Tahun Anggaran 2026 sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2026.
2. Sebagai tolok ukur pengukuran kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rancangan Renja BKPSDM Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II.

HASIL EVALUASI RENCANA RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 mencakup:

1. Evaluasi hasil pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2024.
2. Evaluasi Tahun 2024 tersebut dikaitkan dengan pencapaian target Perubahan Renstra BKPSDM Tahun 2021-2026 berdasarkan realisasi program, kegiatan, subkegiatan yang telah dilaksanakan Tahun 2024 dan perkiraan realisasi Tahun 2025.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2024 digunakan untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi selama Tahun 2024. Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2024 dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program, kegiatan, subkegiatan Renja BKPSDM Tahun 2024 dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2024.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Capaian Perubahan Renstra Perangkat Daerah
Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9) atau (10) = (9)*)	11 = (10/4)
4.01.04	Program Penyelenggaraan Keistimeaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Capaian internalisasi Keistimeaan pada ASN di Kabupaten Bantul	90 Persen	37	60	43,09	71,82	60,00	140,09	35,02
4.01.04.5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi	100 Persen	100	100	100	100,00	100,00	300,00	75,00
4.01.04.50.2.03	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota yang Diselenggarakan	5 Laporan	2	1	1	100,00	1,00	4,00	1,00
5.03.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	82,65 Angka	82,72	82,50	82,72	100,27	82,55	247,99	62,00
5.03.01.2.01	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	95,8 Persen	95	95,40	95,40	100,00	95,40	285,80	71,45
5.03.01.2.01.01	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	50 Dokumen	20	10	10	100,00	10,00	40,00	10,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9) atau (10) = (9)*)	11 = (10/4)
5.03.01.2.0 1.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	35 Laporan	14	7	7	100,00	7,00	28,00	7,00
5.03.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	95,8 Persen	95	95,40	95,40	100,00	95,40	286,00	71,50
5.03.01.2.0 2.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/Bulan	50	49	47	95,92	49,00	146,00	36,50
5.03.01.2.0 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	60 Dokumen	24	12	12	100,00	12,00	48,00	12,00
5.03.01.2.0 2.07	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD	110 Laporan	44	22	22	100,00	26,00	92,00	23,00
5.03.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum	97,4 Persen	97	97,20	97,20	100,00	97,20	291,40	72,85
5.03.01.2.0 6.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket	24	12	12	100,00	12,00	48,00	12,00
5.03.01.2.0 6.03	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	60 Paket	24	12	12	100,00	12,00	48,00	12,00
5.03.01.2.0 6.05	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	60 Paket	24	12	12	100,00	12,00	48,00	12,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9) atau (10) = (9)*)	11 = (10/4)
5.03.01.2.0 6.06	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	120 Dokumen	48	24	24	100,00	24,00	96,00	24,00
5.03.01.2.0 6.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	100 Laporan	40	20	25	125,00	20,00	85,00	21,25
5.03.01.2.0 6.09	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	550 Laporan	220	110	99	90,00	110,00	429,00	107,25
5.03.01.2.0 6.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	10 Dokumen	4	2	2	100,00	2,00	8,00	2,00
5.03.01.2.0 6.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	10 Dokumen	4	3	3	100,00	4,00	11,00	2,75
5.03.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	100	100	100	100,00	100,00	300,00	75,00
5.03.01.2.0 8.01	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60 Laporan	24	12	12	100,00	12,00	48,00	12,00
5.03.01.2.0 8.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 Laporan	24	12	12	100,00	12,00	48,00	12,00
5.03.01.2.0 8.03	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan	60 Laporan	24	12	12	100,00	12,00	48,00	12,00

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9) atau (10) = (9)*)	11 = (10/4)
		Kantor yang Disediakan								
5.03.01.2.0 8.04	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	120 Laporan	48	24	24	100,00	24,00	96,00	24,00
5.03.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	98 Persen	100	98	98	100,00	98,00	296,00	74,00
5.03.01.2.0 9.02	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17 Unit	17	17	17	100,00	17,00	17,00	100,00
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	83 Persen	98	81	76	93,79	81,00	254,79	63,70
		Peta Kompetensi ASN	18 Persen	17,36	45	58,11	129,13	17,00	92,47	23,12
		Persentase Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin	100 Persen	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00
5.03.02.2.01	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Keakuratan Data ASN	95 Persen	98	98	98,94	100,96	95,00	291,94	72,99

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9) atau (10) = (9)*)	11 = (10/4)
5.03.02.2.0 1.02	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (pengadaan CPNS)	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	6 Dokumen	3	2	2	100,00	1,00	6,00	1,50
5.03.02.2.0 1.03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	8 Dokumen	4	2	2	100,00	2,00	8,00	2,00
5.03.02.2.0 1.06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	2254 Dokumen	1047	396	404	102,02	383,00	1.834,00	458,50
5.03.02.2.0 1.11	Sub. Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	125 Dokumen	50	25	25	100,00	25,00	100,00	25,00
5.03.02.2.02	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Persentase pengisian JPT, Administrator , Pengawas dan Jabatan Fungsional	80 Persen	98	80	76,38	95,48	80,00	253,98	63,50
5.03.02.2.0 2.01	Sub. Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah	4000 Dokumen	1863	6.500	220	3,38	2.500,00	4.583,00	1.145,75
5.03.02.2.0 2.02	Sub. Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	4000 Dokumen	1927	1.500	1.878	125,20	800,00	4.605,00	1.151,25

Kode Rekening	Urusan/Bidang Urusan dan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Target Kinerja Kondisi Akhir pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026	Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024			Target Kinerja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Kinerja pada Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024	
					Target Kinerja Tahun 2024	Realisasi Kinerja Tahun 2024	Tingkat Realisasi Tahun 2024 (%)		Perkiraan Realisasi Kinerja s.d Tahun 2025	Perkiraan Tingkat Capaian Realisasi Perubahan Renstra Tahun 2021-2026 s.d Tahun 2024 (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10 = (5+7+9) atau (10) = (9)*)	11 = (10/4)
5.03.02.2.02.03	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	18 Persen	20,45	20	31,43	157,15	20,00	71,88	17,97
5.03.02.2.03.01	Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	258 Orang	118,00	12	12	100,00	20,00	150,00	37,50
5.03.02.2.03.02	Sub. Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment	2250 Dokumen	2632	2.000	2.343	117,15	2.556,00	7.531,00	1.882,75
5.03.02.2.03.04	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	390 Orang	158	43	40	93,02	170,00	368,00	92,00
5.03.02.2.03.05	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	50 Dokumen	20	10	10	100,00	4,00	34,00	8,50
5.03.02.2.03.14	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	24550 Orang	10883	15	20	133,33	-	10.903,00	3.634,33
5.03.02.2.04	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	100 Persen	98	95	99,38	104,61	95,00	292,38	73,10
5.03.02.2.04.02	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	36596 Dokumen	15841	7.945	7.929	99,80	7.908,00	31.678,00	7.919,50
5.03.02.2.04.04	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	1110 Orang	507	230	231	100,43	231,00	969,00	242,25
5.03.02.2.04.07	Sub. Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	150 Orang	65	30	21	130,00	30,00	116,00	29,00

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja BKPSDM Tahun 2024 pada Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor penghambat disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Penghambat

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Tidak Memenuhi Target Kinerja	Faktor Penghambat
1.	Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Target peserta tidak sesuai dengan rencana Renstra
2	Sub. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Adanya mutasi dan pensiun PNS
3	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas diluar prediksi
4	Program Kepegawaian Daerah	Jumlah seluruh ASN belum memenuhi kebutuhan formasi ASN di Pemkab Bantul
5	Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN	Masih adanya kekosongan jabatan
6	Sub. Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN	Target nomenklatur jabatan baru dilaksanakan bulan Januari 2025
7	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Peserta izin belajar belum mengajukan pendaftaran pada tahun 2024
8	Sub. Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Penilain kinerja guru tidak menggunakan e-kinerja

2. Kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang memenuhi target kinerja yang direncanakan dan faktor-faktor pendukung keberhasilan disajikan pada table berikut:

Tabel 2.3

Program/Kegiatan/Subkegiatan yang Memenuhi Target Kinerja yang Direncanakan dan Faktor-Faktor Pendukung Keberhasilan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
1.	Kegiatan Peningkatan Budaya Pemerintahan	Kerjasama yang baik dengan pihak terkait (Paniradya Kaistimewan DIY,dll)

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
2.	Sub. Kegiatan Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan	- Kerjasama yang baik dengan pihak terkait (<i>Paniradya Kaistimewan</i> DIY,dll) - Partisipasi aktif dari peserta diklat
3.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kesesuaian dokumen dalam komponen penilaian sakip
4.	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Komitmen dan Kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait (Bappeda, BPKPAD, Inspektorat)
5.	Sub. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	- Kerjasama dengan pihak terkait (Bappeda, BPKPAD, Inspektorat) - ketersediaan data perencanaan; - Kepatuhan terhadap jadwal.
6.	Sub. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	- Ketersediaan aplikasi SIPD, Sakip, dll; - Kerjasama yang baik dengan pelaksana kegiatan.
7.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait
8.	Sub Kegiatan Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	- Ketersediaan aplikasi; - Kerjasama dan komitmen dengan pelaksana kegiatan.
9.	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	- Ketersediaan aplikasi; - Kerjasama dan komitmen dengan pelaksana kegiatan.
10.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait
11.	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Kerjasama yang baik dengan pelaksana kegiatan; - Adanya dukungan data; - Tersedianya pilihan penyedia jasa.
12.	Sub. Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	- Tersusunnya rencana kebutuhan kegiatan
13.	Sub. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Tersusunnya rencana kebutuhan kegiatan; - Tersedianya pilihan penyedia jasa.
14.	Sub. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	- Kemudahan dan tersedianya bahan bacaan; - Tersedianya pilihan penyedia jasa.
15.	Sub. Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	- Kerjasama yang baik dengan pelaksana kegiatan
16.	Sub. Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Kerjasama yang baik dengan pelaksana kegiatan

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
17.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kerjasama yang baik dengan pelaksana kegiatan
18.	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kemudahan dan ketersediaan penyedia jasa telekomunikasi
19.	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	- Adanya data rencana kebutuhan pemeliharaan peralatan dan perlengkapan kantor; - Kemudahan dan ketersediaan penyedia
20.	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kemudahan dan ketersediaan penyedia jasa
21.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kerjasama yang baik dengan pelaksana kegiatan
22.	Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Adanya data rencana kebutuhan pemeliharaan kendaraan; - Kemudahan dan ketersediaan penyedia.
23.	Program Kepegawaian Daerah	Kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait
24.	Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait
25.	Sub. Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN (pengadaan CPNS)	- Tersedianya aplikasi yang mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan; - Kerjasama yang baik dengan instansi pusat.
26.	Sub. Kegiatan Evaluasi Pemberhentian ASN	- Tersedianya aplikasi yang mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan; - Kerjasama yang baik dengan instansi pembina. Dukungan pengelola kepegawaian perangkat daerah
27.	Sub. Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian	- Koordinasi yang baik antar bidang dalam proses updating data kepegawaian; Ketersediaan sumber daya yang memadai.
28.	Sub. Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	- Tersedianya aplikasi yang mempermudah dan mempercepat pelaksanaan kegiatan;

No	Program/Kegiatan yang Memenuhi Target Kinerja	Faktor Pendukung Keberhasilan
		- Kerjasama yang baik dengan instansi pembina.
29.	Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN	- Komitmen dan Kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait
30.	Sub. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	- Kerjasama yang baik dengan pihak penyelenggara; - Ketersediaan data.
31.	Sub. Kegiatan Pengelolaan Assessment Center	- Kerjasama yang baik dengan pihak terkait; - Ketersediaan SDM assessor; Ketersediaan sarana penunjang.
32.	Sub. Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	- Adanya kebijakan/peraturan; - Kerjasama yang baik dengan penyelenggara diklat; - Kesadaran ASN dalam pengembangan kompetensi.
33.	Sub. Kegiatan Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	- Ketersediaan aplikasi; - Kerjasama yang baik dengan perangkat daerah dalam proses penyusunan dan verifikasi angka kredit PNS jabatan fungsional.
34.	Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	- Komitmen dan Kerjasama yang baik dengan semua pihak terkait
35.	Sub. Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	- Ketersediaan aplikasi; Komitmen dan Kerjasama yang baik oleh pelaksana kegiatan.
36.	Sub. Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN	- Adanya kebijakan/peraturan; - Kesadaran ASN terkait kedisiplinan dan kode etik pegawai.

Sebagaimana faktor-faktor penghambat dan pendukung yang disajikan pada Tabel 2.2, dan Tabel 2.3, maka kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran pada Tahun 2026 yang perlu diambil sehingga seluruh kinerja program/kegiatan/subkegiatan yang direncanakan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi dengan Instansi Pusat terkait dengan kebijakan pada bidang kepegawaian;
2. Peningkatan koordinasi dengan Paniradya DIY dan Bandiklat DIY terkait target dan pelaksanaan kegiatan internalisasi keistimewaan agar berjalan optimal;
3. Kolaborasi yang intensif dengan pihak/stakeholder terkait pelaksanaan program/kegiatan;

4. Penyusunan dokumen perencanaan yang berdasar pada evaluasi kinerja tahun sebelumnya, agar lebih tepat dalam penentuan target kinerja.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah merupakan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan BKPSDM berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan. Sehubungan dengan hal tersebut, analisis kinerja Perangkat Daerah dilakukan terhadap penilaian capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2024 sesuai IKU yang telah ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan IKU pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Capaian IKU Perangkat Daerah Tahun 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan BKPSDM
Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Realisasi			Target	
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	IKU lama: Capaian Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	57,44	72,68	80,68	81	
2.	IKU baru: Capaian Indeks Sistem Merit	Nilai	142,5	287,5	287,5	287,5	305

Sesuai pencapaian IKU BKPSDM Tahun 2024 yang disajikan pada Tabel 2.4, dapat diketahui bahwa IKU BKPSDM Capaian Indeks Profesionalitas ASN telah memenuhi target.

IKU tersebut memenuhi target karena didukung oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Meningkatnya kesadaran ASN untuk meningkatkan kompetensi;
- b. Dukungan teknologi informasi dalam peningkatan kompetensi dan penilaian kompetensi;

- c. Kerja sama dan koordinasi yang baik dengan Badan Kepegawaian Negara selaku instansi Pembina Kepegawaian;
- d. Tersedianya aplikasi kepegawaian (SAPA ASN) yang sudah tersinkronisasi dengan aplikasi kepegawaian nasional SI-ASN;
- e. Soliditas Tim kerja pengukuran Indeks Profesionalitas ASN tahun 2024 yang baik.

Sesuai hasil analisis terhadap IKU BKPSDM Tahun 2024 tersebut, maka kebijakan/langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan pada Tahun 2025 supaya IKU yang telah ditetapkan dapat tercapai adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Talenta;
2. Pengembangan Kompetensi ASN Terintegrasi (Corporate University);
3. Penguatan Manajemen Kinerja dan Kesejahteraan Pegawai;
4. Digitalisasi Layanan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

BKPSDM merupakan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan kepegawaian. Dalam penyelenggaraan urusan tersebut, ditemui kekuatan dan kelemahan pada Tahun 2024 sebagai berikut :

Tabel 2.5

Kekuatan dan Kelemahan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Kekuatan	Kelemahan
Ketersediaan sumber daya manusia	Kompetensi sumber daya manusia ASN Kab. Bantul
Tersedianya teknologi informasi	Sistem informasi kepegawaian belum terintegrasi

Selain itu, selama Tahun 2024 juga ditemui beberapa peluang dan tantangan yaitu:

Tabel 2.6

Peluang dan Tantangan yang Dihadapi Selama Tahun 2024

Peluang	Tantangan
Artificial Intelligence (AI)	Birokrat Lincih

Dengan memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan yang dihadapi selama Tahun 2024, maka strategi pada Tahun 2026 yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Talenta;
2. Pengukuran potensi dan kompetensi PNS;
3. *Update* profil talenta PNS;
4. Rencana pengembangan kompetensi berbasis *Corporate University*;
5. Manajemen penilaian kinerja ASN;
6. Rekrutmen ASN *Digital Native*;
7. Keamanan data dan informasi;
8. Integrasi sistem informasi layanan kepegawaian.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 dengan hasil analisis kebutuhan BKPSDM Tahun 2026. Hasil review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.7

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	4.01.04.Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan Ketatalaksanaan****)	Kab. Bantul	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	40 Persen	741.084.500	4.01.04. Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Kelembagaan Dan	Kab. Bantul	Capaian internalisasi Keistimewaan pada ASN di Kabupaten Bantul	25 Persen	307,794,000	
	4.01.04.2.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan****)	Kab. Bantul	Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi	100 Persen	741.084.500	4.01.04.2.02 Peningkatan Budaya Pemerintahan	Kab. Bantul	Persentase peningkatan pemahaman peserta Diklat Internalisasi	100 Persen	307,794,000	
	4.01.04.2.02.08 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota****)	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota yang Diselenggarakan	1 Laporan	741.084.500	4.01.04.2.02.08 Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota yang Diselenggarakan	1 Laporan	307,794,000	
	5.03. 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	82.65 Angka	9.224.977.612	5.03. 01 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Bantul	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah	82.55 Angka	18.961.245.159	
	5.03. 01 2.01 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Perangkat Daerah	95.4 Persen	16.233.209	5.03. 01 2.01 Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100 Persen	6.750.000	
	5.03. 01 2.01 01	Kab.	Jumlah Dokumen	6 Dokumen	7.562.077	5.03. 01 2.01 01	Kab.	Jumlah Dokumen	10 Dokumen	3.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bantul	Perencanaan Perangkat Daerah			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Bantul	Perencanaan Perangkat Daerah			
	5.03. 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	8.671.132	5.03. 01 2.01 07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Laporan	3750000	
	5.03. 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	95.4 Persen	6.997.119.190	5.03. 01 2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	95.4 Persen	18.000.311.541	
	5.03. 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1378 Orang/Bulan	6.848.230.899	5.03. 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1378 Orang/Bulan	17.856.226.541	
	5.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	143.160.000	5.03.01.2.02.02 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	142.560.000	
	5.03. 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan /Semesteran SKPD	22 Laporan	5.728.291	5.03. 01 2.02 07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan / Semesteran SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	22 Laporan	1.525.000	
	5.03. 01 2.06 Administrasi Umum	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan	97.2 Persen	1.421.051.198	5.03. 01 2.06 Administrasi Umum	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pengelolaan	97.1 Persen	681.093.798	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Perangkat Daerah		Administrasi Umum			Perangkat Daerah		Administrasi Umum			
	5.03. 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	224.900.008	5.03. 01 2.06 02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket	148.866.390	
	5.03. 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	19 Paket	32.175.594	5.03. 01 2.06 03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Bantul	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	23.907.708	
	5.03. 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	59.952.830	5.03. 01 2.06 05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Bantul	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	17.255.200	
	5.03. 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	3.513.840	5.03. 01 2.06 06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	24 Dokumen	2.400.000	
	5.03. 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	7.500.000	5.03. 01 2.06 08 Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan	15.750.000	
	5.03. 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	1.030.394.055	5.03. 01 2.06 09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan	259.477.000	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	47.614.872	5.03. 01 2.06 10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen	6.537.500	
	5.03. 01 2.06 11 Dukungan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan	4 Dokumen	15.000.000	5.03. 01 2.06 11 Dukungan	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Dukungan	2 Dokumen	206.900.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			
	5.03. 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang	100 Persen	310.755.274	5.03. 01 2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100 Persen	53.385.820	
	5.03. 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	14.641.000	5.03. 01 2.08 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.500.000	
	5.03. 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	34.259.940	5.03. 01 2.08 02 Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi. Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	6.601.800	
	5.03. 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	147.581.280	5.03. 01 2.08 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	29.641.000	
	5.03. 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	114.273.054	5.03. 01 2.08 04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Bantul	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	24 Laporan	15.643.020	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	5.03. 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	98 Persen	275.631.740	5.03. 01 2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Bantul	Capaian Kinerja Pemeliharaan BMD	98 Persen	219.704.000	
	5.03. 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	275.631.740	5.03. 01 2.09 02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan. Biaya Pemeliharaan. Pajak. dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Bantul	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	18 Unit	219.704.000	
	5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	Kab. Bantul	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	81 persen		5.03.02 Program Kepegawaian Daerah	Kab. Bantul	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN	86 Persen	1.333.690.530	
			Peta Kompetensi ASN	12 persen				Capaian Pelaksanaan Penilaian Potensi dan atau Kompetensi ASN	100 Persen	2.199.628.000	
			Persentase Penanganan Terhadap Pelanggaran Disiplin	100 persen				Persentase Penilaian Kinerja ASN	95,75 Persen	413.977.500	
	5.03.02.2.01 Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi	Kab. Bantul	Persentase Keakuratan Data ASN	95 Persen	1.348.135.800	5.03.02.2.01 Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi	Kab. Bantul	Persentase Keakuratan Data ASN	98 persen	1.043.960.530	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	Kepegawaian ASN					Kepegawaian ASN					
	5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	16.000.000	5.03.02.2.01.02 Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan. Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	1 Dokumen	4.250.000	
	5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	1.184.000.000	5.03.02.2.01.03 Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen	959.838.000	
	5.03.02.2.01.07 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	427 Dokumen	78.015.000	5.03.02.2.01.07 Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	530 Dokumen	34.662.500	
	5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Bantul	Laporan updating data kepegawaian	24 Dokumen	70.120.800	5.03.02.2.01.11 Pengelolaan Data Kepegawaian	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian	25 Dokumen	45.210.030	
	5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Kab. Bantul	Persentase pengisian JPT. Administrator . Pengawas dan Jabatan Fungsional	80 Persen	655.318.000	5.03.02.2.02 Mutasi dan Promosi ASN	Kab. Bantul	Persentase pengisian JPT. Administrator . Pengawas dan Jabatan Fungsional	98 Persen	289.730.000	
	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan	800 Dokumen	492.818.000	5.03.02.2.02.01 Pengelolaan Mutasi ASN	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan	800 Dokumen	245.430.000	

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
			Administrasi. Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah					Administrasi. Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			
	5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Bantul	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	800 Dokumen	162.500.000	5.03.02.2.02.02 Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Kab. Bantul	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	925 Dokumen	44.300.000	
	5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Bantul	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	18 Persen	4.035.595.000	5.03.02.2.03 Pengembangan Kompetensi ASN	Kab. Bantul	Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	20,5 Persen	2.199.628.000	
	5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang	20.250.000	5.03.02.2.03.01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Meningkatkan Kapasitasnya	50 Orang	11.250.000	
	5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment	500 Dokumen	70.500.000	5.03.02.2.03.02 Pengelolaan Assessment Center	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment	3000 Dokumen	106.100.000	
	5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	90 Orang	145.250.000	5.03.02.2.03.04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan	85 Orang	109.750.000	
	5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	10 Dokumen	3.700.408.000	5.03.02.2.03.05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama Pelaksanaan Diklat	10 Dokumen	1.972.528.000	
	5.03.02.2.03.13 Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	5350 Orang	99.187.000	5.03.02.2.03.14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Kab. Bantul	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang Mendapatkan Layanan Pengembangan Karir	-	-	Subkegiatan tidak dilaksanakan dari tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD Tahun 2026					Hasil Analisis Kebutuhan Tahun 2026					Catatan penting
	Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/ Kegiatan /Subkegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
	5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Bantul	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	90 Persen	488.489.000	5.03.02.2.04 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Bantul	Persentase Aparatur yang Menyusun Dokumen Penilaian	98 Persen	413.977.500	
	5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	9149 Dokumen	40.550.000	5.03.02.2.04.02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Kab. Bantul	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	7884 Dokumen	172.325.000	
	5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	896 Orang	370.334.000	5.03.02.2.04.04 Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	230 Orang	188.512.500	
	5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	896 Orang	77.605.000	5.03.02.2.04.07 Pembinaan Disiplin ASN	Kab. Bantul	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	35 Orang	53.140.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyusunan Renja BKPSDM Tahun 2026, dilakukan pula telaah terhadap usulan masyarakat. Penelaahan usulan masyarakat merupakan salah satu wujud pendekatan *bottom-up planning*. Penelaahan usulan masyarakat dilakukan melalui penyelarasan usulan masyarakat yang telah diperoleh dalam musrenbang kapanewon, forum perangkat daerah, maupun musrenbang kabupaten dengan tema dan prioritas daerah Tahun 2026 serta tugas dan fungsi BKPSDM.

Berdasarkan hasil penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat, tidak ada usulan masyarakat yang sesuai dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi BKPSDM.

BAB III.

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Tema pembangunan nasional dalam RKP Tahun 2026 adalah "Kedaulatan Pangan, Energi, Ekonomi, yang Produktif dan Inklusif" dengan Prioritas Nasional meliputi:

1. Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Prioritas Nasional 2: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. Prioritas Nasional 3: Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Prioritas Nasional 4: Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Prioritas Nasional 5: Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Prioritas Nasional 6: Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;

7. Prioritas Nasional 7: Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Prioritas Nasional 8: Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Delapan prioritas tersebut memuat 17 program prioritas presiden yang mencakup rencana pembangunan di berbagai sektor langkah-langkah berupa program hasil terbaik cepat/*quick wins* sebagai berikut:

Tabel 3.1 17 Program Prioritas dan 8 Program Hasil Terbaik Cepat

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
1. Mencapai swasembada pangan, energi, dan air.	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara.	2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun rumah sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
3. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi.	3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi.	4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
5. Pemberantasan kemiskinan.	5. Melanjutkan dan
6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba.	
7. Menjamin tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia, peningkatan BPJS kesehatan dan penyediaan obat untuk rakyat.	
8. Penguatan pendidikan, sains, dan teknologi, serta digitalisasi.	
9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan	

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif. 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas. 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup. 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani. 13. Menjamin pembangunan hunian berkualitas terjangkau, bersanitasi baik untuk masyarakat perdesaaan/perkotaan dan rakyat yang membutuhkan. 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi dan penguatan UMKM melalui program kredit usaha dan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) serta kota-kota inovatif, karakteristik-mandiri lainnya. 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis Sumber Daya Alam (SDA) termasuk sumber daya maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi. 16. Memastikan kerukunan antarumat beragama,	menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut. 6. Kenaikan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluh), TNI/POLRI, dan pejabat negara. 7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial, generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). 8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT
kebebasan beribadah, pendirian, dan perawatan rumah ibadah. 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.	

Dalam rangka mendukung kebijakan nasional Tahun 2026 tersebut, maka kebijakan dan langkah strategis yang akan ditempuh oleh BKPSDM Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- 1) Infrastruktur Berkelanjutan.
- 2) Reformasi Pelayanan Publik.
- 3) SDM Berbudaya dan Berkualitas.
- 4) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana.
- 5) Pengembangan Sektor Unggulan Berbasis Inovasi dan Hilirisasi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tema Pembangunan Tahun 2026 dalam RKPD Kabupaten Bantul Tahun 2026 adalah "Penguatan Ekonomi Berbasis Sektor Unggulan Didukung SDM Berkualitas dan Infrastruktur Berkelanjutan" dengan Prioritas Daerah (PD) sesuai Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai berikut:

- PD-1: Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia.
- PD-2: Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan.
- PD-3: Mewujudkan transformasi ekonomi berbasis sumberdaya lokal didukung investasi.
- PD-4: Mewujudkan transformasi infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana.
- PD-5: Mewujudkan transformasi sosial dan pelestarian budaya.

Dengan memperhatikan tema dan prioritas pembangunan Kabupaten Bantul Tahun 2026 tersebut, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan

fungsi BKPSDM serta tujuan dan sasaran Perubahan Renstra BKPSDM Tahun 2025-2029, maka rumusan tujuan dan sasaran Renja BKPSDM Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BKPSDM Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Satuan	Baseline		Target 2026
					Realisasi 2024	Target 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Mewujudkan ASN sebagai pelayan publik yang profesional		Capaian Indeks Profesionalitas ASN	Nilai	80,68	81	82
		Mewujudkan Manajemen ASN berdasarkan Sistem Merit sesuai dengan Prinsip Meritokrasi	Capaian Indeks Sistem Merit	Nilai	287,5	287,5	305

BAB IV.

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah berisi rumusan rencana program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan oleh BKPSDM Tahun 2025 disertai dengan indikator kinerja dan pagu indikatifnya. Rumusan rencana program/kegiatan BKPSDM Tahun 2026 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kabupaten Bantul

Nama Perangkat Daerah: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA						22.710.709.319,00							31.168.368.772,00	
	4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN						307.794.000,00							150.000.000,00	
	4,01	SEKRETARIAT DAERAH						307.794.000,00							150.000.000,00	
1	4.01.0 4	PROGRAM PENYELENGGARAAN KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA URUSAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	Persentase pegawai yang meningkat pemahamannya tentang keistimewaan DIY	-			37.50 Nilai	307.794.000,00						-	150.000.000,00	
	4.01.04 .5.02	Peningkatan Budaya Pemerintahan	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan Keistimewaan	-			100 Persen	307.794.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kab. Bantul	-	150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	4.01.04 .5.02.0 003	Penyelenggaraan Diklat Keistimewaan Kabupaten/Kota														
			Jumlah Laporan Hasil Diklat Keistimewaan Kabupaten/ Kota yang Diselenggarakan				1 Laporan	307.794.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul	BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kab. Bantul		150.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						22.402.915.319,00							31.018.368.772,00	
	5,03	KEPEGAWAIAN						20.437.877.319,00							29.107.161.272,00	
1	5.03.0 1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	-			84.20 Angka 86 Nilai	18.959.950.287,00						-	27.629.234.240,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01 .2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-			100 Persen	6.750.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	BKPSDM Kab. Bantul	-	7.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01 .2.01.0 001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				10 Dokumen	3.000.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	BKPSDM Kab. Bantul		4.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01 .2.01.0 007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				7 Laporan	3.750.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	BKPSDM Kab. Bantul		3.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01 .2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Keuangan	-			100 Persen	18.000.311.541,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	BKPSDM Kab. Bantul	-	26.590.516.174,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01 .2.02.0 001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				50 Orang/bul an	17.856.226.541,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	BKPSDM Kab. Bantul		26.445.956.174,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01 .2.02.0 002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				12 Dokumen	142.560.000,00	Kab. Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	BKPSDM Kab. Bantul		142.560.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01 .2.02.0 007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan a n/ Semesteran SKPD				19 Laporan	1.525.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	BKPSDM Kab. Bantul		2.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01 .2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Capaian Kinerja Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100 Persen	677.368.786,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	BKPSDM Kab. Bantul	-	707.874.386,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01 .2.06.0 002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				14 Paket	170.866.678,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	BKPSDM Kab. Bantul		170.866.678,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01 .2.06.0 003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				13 Paket	25.233.708,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	BKPSDM Kab. Bantul		25.857.708,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01 .2.06.0 005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				10 Paket	14.565.900,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	BKPSDM Kab. Bantul		18.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01 .2.06.0 006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				12 Dokumen	2.400.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	BKPSDM Kab. Bantul		2.400.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01 .2.06.0 008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				20 Laporan	15.750.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	BKPSDM Kab. Bantul		15.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01 .2.06.0 009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				50 Laporan	236.640.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	BKPSDM Kab. Bantul		250.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01 .2.06.0 010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				2 Dokumen	6.537.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	BKPSDM Kab. Bantul		15.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01 .2.06.0 011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD														
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				3 Dokumen	205.375.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	BKPSDM Kab. Bantul		210.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01 .2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Capaian Kinerja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			100 Persen	56.800.160,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	BKPSDM Kab. Bantul	-	104.373.880,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01 .2.08.0 001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	1.500.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	BKPSDM Kab. Bantul		2.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.01 .2.08.0 002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>				4 Laporan	4.801.800,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	BKPSDM Kab. Bantul		4.801.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01 .2.08.0 003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	29.641.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	BKPSDM Kab. Bantul		35.000.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01 .2.08.0 004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			<i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>				12 Laporan	20.857.360,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	BKPSDM Kab. Bantul		62.572.080,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01 .2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Capaian Kinerja Pemeliharaan Kendaraan Dinas dan Operasional</i>	-			100 Persen	218.719.800,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	BKPSDM Kab. Bantul	-	218.719.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.01 .2.09.0 002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				17 Unit	218.719.800,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	BKPSDM Kab. Bantul		218.719.800,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
2	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase pengisian kebutuhan formasi ASN Capaian Pelaksanaan Penilaian Potensi dan atau Kompetensi ASN Persentase Penilaian Kinerja ASN	-			86 Persen 100 Persen 95,75 Persen	1.477.927.032,00						-	1.477.927.032,00	
	5.03.02.2.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Keterisian Formasi Kebutuhan ASN	-			100 Persen	663.669.532,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kab. Bantul dan Masyarakat	-	663.669.532,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN				1 Dokumen	4.250.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kab. Bantul dan Masyarakat		4.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02.2.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK														
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK				2 Dokumen	579.588.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kab. Bantul dan Masyarakat		579.588.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5.03.02 .2.01.0 006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian														
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian				403 Dokumen	34.662.500,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kab. Bantul dan Masyarakat		34.662.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02 .2.01.0 011	Pengelolaan Data Kepegawaian														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data Kepegawaian				13 Dokumen	45.169.032,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kab. Bantul dan Masyarakat		45.169.032,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02 .2.02	Mutasi dan Promosi ASN	Capaian Pengelolaan Mutasi dalam Jabatan	-			26,2 Persen	292.280.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kab. Bantul	-	292.280.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02 .2.02.0 001	Pengelolaan Mutasi ASN														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah				525 Dokumen	247.980.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kab. Bantul		247.980.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02 .2.02.0 002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN				500 Dokumen	44.300.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kab. Bantul		44.300.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02 .2.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Capaian Pengembangan Kompetensi ASN	-			76,09 Persen	127.100.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kab. Bantul	-	127.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02 .2.03.0 001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN														
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya				30 Orang	11.250.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kab. Bantul		11.250.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02 .2.03.0 002	Pengelolaan Assessment Center														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center				1 Dokumen	106.100.000,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kab. Bantul		106.100.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02 .2.03.0 004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan				50 Orang	9.750.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kab. Bantul		9.750.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02 .2.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Capaian ASN berkinerja baik dan sangat baik	-			97.40 Persen	394.877.500,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kab. Bantul	-	394.877.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02 .2.04.0 002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				8298 Dokumen	157.475.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kab. Bantul		157.475.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02 .2.04.0 004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai														
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan				167 Orang	188.512.500,00	Kab. Bantul, Semua Kecamatan , Semua Kel/Desa Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kab. Bantul		188.512.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.03.02 .2.04.0 007	Pembinaan Disiplin ASN														
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan				25 Orang	48.890.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good-gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kab. Bantul		48.890.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5,04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						1.965.038.000,00							1.911.207.500,00	
1	5.04.02	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) Capaian Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Pelatihan	-			47,31 Persen 75 Persen	1.965.038.000,00						-	1.911.207.500,00	
	5.04.02 .2.01	Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan Teknis dan Sosiokultural ASN	-			100 Persen	976.576.000,00			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kab. Bantul	-	1.071.527.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02 .2.01.002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun				2 Dokumen	221.426.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kab. Bantul		36.375.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02 .2.01.003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum														
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi				845 Orang	755.150.000,00	Kab. Bantul, Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan	5. Penguatan good-governance pada berbagai tingkatan 2. Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kab. Bantul		1.035.152.500,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
											.					
	5.04.02 .2.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	<i>Persentase Kelulusan ASN yang mengikuti Pelatihan Manajerial, Fungsional dan Pelatihan Dasar ASN</i>	-			100 Persen	988.462.000,00			Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kab. Bantul	-	839.680.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
	5.04.02 .2.02.0 007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</i>				3 Laporan	988.462.000,00	Kab. Bantul, Bantul	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkua t reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pemberant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	5. Penguatan good- gover nance pada berbagai tingkatan 2. Mewujud kan transfor masi tata kelola pem erintahan dan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan	ASN Kab. Bantul		839.680.000,00	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA
			J U M L A H					22.710.709.319,00							31.168.368.772,00	

BAB V.

PENUTUP

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode Tahun 2026. Dokumen ini disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Kabupaten Bantul dan berpedoman pada Rancangan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 serta mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026.

Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun 2026. Selain itu, Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 akan menjadi dasar evaluasi hasil rencana pembangunan tahunan daerah untuk periode Tahun 2026. Evaluasi terhadap hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dilakukan setiap triwulan dalam tahun berkenaan. Dalam hal hasil evaluasi tersebut ditemukan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi dan keuangan daerah yang digunakan serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, dapat dilakukan penyesuaian.

Plt. KEPALA,



Ir. ISA BUDIHARTOMO, MT
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 196805051996031003